



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENDANAAN TRANSISI ENERGI MELALUI SKEMA JETP

T. Ade Surya

Analisis Legislatif Ahli Muda
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada KTT G20 tahun 2022 lalu di Bali, sejumlah negara maju berkomitmen membantu pembiayaan program transisi energi di Indonesia melalui skema Kerja Sama Transisi Energi yang Adil atau *Just Energy Transition Partnership* (JETP). Dalam skema JETP ini, pemerintah mendapatkan komitmen pendanaan sekitar USD20 miliar atau sekitar Rp310 triliun yang akan dimobilisasi oleh negara-negara International Partners Group (IPG) sebagai donor JETP selama 3 hingga 5 tahun mendatang. Nilai pendanaan ini sebenarnya masih jauh untuk dapat membiayai seluruh kebutuhan transisi energi di Indonesia dalam upaya mencapai nol emisi atau *net zero emission* pada tahun 2060, namun cukup membantu dalam pembangunan infrastruktur awal. Total pembiayaan atau investasi yang dibutuhkan untuk transisi energi sampai tahun 2060 diperkirakan dapat mencapai USD1 triliun sejalan dengan target pemanfaatan energi terbarukan yang lebih agresif.

Terlepas dari tidak cukupnya pendanaan skema JETP untuk membiayai seluruh kebutuhan transisi energi di Indonesia, terdapat tantangan dan risiko terkait dengan pendanaan skema JETP ini. Menurut Peneliti dari Centre for Strategic and International Studies, Novia Xu, tantangan dan risiko dalam pendanaan skema JETP, yaitu *pertama*, ada perbedaan prioritas transisi energi Indonesia dengan IPG. Indonesia cenderung mengutamakan pembangunan transmisi energi andal sementara IPG ingin mendukung penuh energi terbarukan variabel, seperti tenaga surya dan angin. *Kedua*, terkait porsi dana hibah yang kecil. Dari angka yang sempat muncul, porsi dana hibah hanya 0,8% dari total komitmen pendanaan atau hanya sekitar USD160 juta. Padahal Indonesia berharap mendapatkan porsi dana hibah yang lebih tinggi untuk mengurangi beban APBN. Hal ini karena skema pendanaan JETP merupakan bentuk pinjaman komersial yang bahkan belum diketahui besaran bunganya.

Dalam tindak lanjut pendanaan skema JETP, perlu ada komitmen dari pemerintah dalam memetakan investasi energi bersih secara konkret. Saat ini, pemerintah masih melengkapi dokumen rencana investasi dan kebijakan komprehensif atau *comprehensive investment and policy plan* (CIPP) JETP, yang sebelumnya ditargetkan selesai pada 16 Agustus 2023, menjadi mundur dan direncanakan baru akan terealisasi akhir tahun ini. Salah satu alasannya karena pemerintah perlu berkonsultasi lebih lanjut dengan IPG terkait rencana transisi energi yang akan ditempuh Indonesia.

Pemerintah perlu mencari sumber pendanaan alternatif selain pendanaan dengan skema JETP untuk kebutuhan transisi energi. Walaupun saat ini terdapat skema pendanaan lain selain skema pendanaan JETP, seperti *Energy Transition Mechanism* (ETM), Program Mentari, dan *green bond*, namun nilainya masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan skema pendanaan JETP. Selain itu, pemerintah harus lebih berkomitmen dalam pengembangan energi terbarukan terkait dengan program transisi energi, khususnya dalam penyusunan kebijakan yang pro terhadap pembangunan "hijau" serta regulasi yang memudahkan dan menguntungkan semua pihak.

Atensi DPR

Indonesia mendapatkan bantuan pembiayaan program transisi energi melalui pendanaan skema JETP. Dalam skema JETP ini, pemerintah mendapatkan komitmen pendanaan sekitar USD20 miliar atau sekitar Rp310 triliun. Nilai pendanaan ini masih jauh untuk dapat membiayai seluruh kebutuhan transisi energi di Indonesia dalam upaya mencapai nol emisi atau *net zero emission* pada tahun 2060, yang diperkirakan dapat mencapai USD1 triliun sejalan dengan target pemanfaatan energi terbarukan yang lebih agresif. Selain itu, terdapat tantangan dan risiko dalam pendanaan skema JETP, yaitu perbedaan prioritas transisi energi Indonesia dengan IPG dan porsi dana hibah yang kecil. Terkait dengan pendanaan program transisi energi, tentu perlu mendapat perhatian dari DPR RI khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk intensif berkomunikasi dengan IPG agar pendanaan skema JETP dapat segera dicairkan. Komisi VII DPR RI juga perlu terus mendorong pemerintah mencari sumber pendanaan alternatif lainnya untuk kebutuhan transisi energi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 22 dan 25 Agustus 2023;
ekonomi.republika.co.id, 23 Agustus 2023;
Kompas, 26 Agustus 2023; dan
Kontan, 22 Agustus 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.